

Judul : Perkuat ekosistem bioenergi nasional, DPR dukung implementasi B50
Tanggal : Jumat, 03 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perkuat Ekosistem Bioenergi Nasional DPR Dukung Implementasi B50

SENAYAN menyambut baik kebijakan Pemerintah memberlakukan biodiesel B50 secara nasional mulai Rabu (1/7/2026). Kebijakan tersebut dinilai merupakan tonggak penting dalam memperkuat ekosistem bioenergi nasional, mempercepat hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), dan memperkuat ketahanan energi Indonesia.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengatakan, implementasi B50 menunjukkan konsistensi Pemerintah menjalankan agenda swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah dinamika geopolitik dan fluktuasi harga energi global, pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik menjadi strategi yang tepat untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Program B50 bukan sekadar meningkatkan persentase campuran biodiesel, tetapi menjadi fondasi bagi terbentuknya ekosistem bioenergi nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir," kata Bambang di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Diketahui, B50 adalah bahan bakar diesel yang mengandung 50

persen biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 50 persen solar konvensional. Penerapan mandatori B50 diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257/K/EK.01/MEM.E/2026 tentang kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 50 persen.

Aturan tersebut ditetapkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 17 Juni 2026 di Jakarta. Program ini menjadi kelanjutan kebijakan biodiesel nasional setelah implementasi B35 dan B40. Kepastian kebijakan seperti ini akan memberikan sinyal posi-



Bambang Patijaya

tif bagi dunia usaha untuk terus berinvestasi dalam pengembangan industri bioenergi nasional.

Bambang melanjutkan, berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi B50 diproyeksikan meningkatkan kebutuhan biodiesel nasional menjadi sekitar 17,6 juta kiloliter pada 2026. Selain itu, berpotensi menghemat devisa negara sekitar Rp 157 triliun melalui pengurangan impor solar. Selain memberikan manfaat fiskal, kebijakan tersebut juga memperkuat pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi yang memiliki nilai tambah tinggi.

Bambang menambahkan, implementasi B50 diharapkan mendorong tumbuhnya investasi pada sektor pengolahan biodiesel, penguatan infrastruktur distribusi, pengembangan teknologi, hingga peningkatan kapasitas industri penunjang. "Dengan demikian, manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan pada sektor energi, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia," harap politisi Golkar ini.

Dia mengapresiasi kesiapan Pemerintah yang terlebih dahulu melakukan pengujian teknis B50 pada berbagai moda transportasi. Seperti alat berat, perkeretaapian, dan sektor in-

dustri sebelum diterapkan secara nasional. Pendekatan berbasis pengujian tersebut menunjukkan Pemerintah mengedepankan aspek keselamatan, kualitas, dan keandalan implementasi kebijakan.

Komisi XII DPR, tegas Bambang, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar implementasi B50 berjalan sesuai target. Mulai dari kesiapan pasokan bahan baku, kualitas biodiesel, efektivitas distribusi, hingga keberlanjutan kebijakan. Pengawasan tersebut penting agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian nasional.

Bambang berharap, implementasi B50 menjadi pijakan untuk mempercepat pengembangan bioenergi nasional, termasuk bioetanol dan bahan bakar nabati lainnya. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan energi terbarukan berbasis biofuel. "Juga memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan," imbuah legislator asal Bangka Belitung (Babel) itu.

Sementara, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengatakan, implementasi B50 diterapkan secara nasional mulai 1 Juli 2026. Ada masa transisi selama 3 bulan untuk penyesuaian di lapangan, termasuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran (*blending*).

"Secara nasional ada masa jeda untuk penyesuaiannya. Masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu," ujar Laode di Jakarta, Rabu (1/7/2026). Sementara, harganya akan mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga BBM yang berlaku saat ini untuk solar. "Enggak ada hal khusus," ujarnya. ■ TIF